



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian kajian pustaka akan menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Landasan teori berisi konsep atau teori yang mendasari bidang yang sedang diteliti serta memperkuat atau mendukung variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu sebagai referensi serta pembandingan terhadap teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur hubungan antara masing-masing variabel penelitian serta menjelaskan hubungan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Dari pembahasan tersebut, maka peneliti dapat menarik suatu hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang diteliti.

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi diungkapkan dengan memberikan gambaran bahwa terdapat perbedaan antara nilai-nilai suatu perusahaan dengan masyarakat, sehingga suatu perusahaan dapat melakukan hal tersebut. berada dalam posisi rentan jika mereka mempunyai perbedaan atau yang disebut dengan legitimacy gap. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika masyarakat memahami bahwa perusahaan bekerja selaras dengan masyarakat itu sendiri, maka kehadiran perusahaan dapat terus berlanjut. Ketidaktahuan akan dampak yang mungkin terjadi terhadap operasional perusahaan dapat menyebabkan hilangnya legitimasi (Lindawati & Puspita, 2015). Menurut teori legitimasi, perusahaan harus senantiasa meyakinkan masyarakat bahwa tindakannya sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan operasi perusahaan.



Menurut Addini *et.al* (2019) teori legitimasi menjelaskan bahwa teori ini menekankan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka berperilaku sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada masyarakat di mana mereka beroperasi. Agar suatu perusahaan dapat dinilai oleh masyarakat, maka perusahaan harus memperoleh pengakuan dari masyarakat dengan mengungkapkan dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Setelah diterima oleh masyarakat, maka perusahaan tersebut menjadi sah.

Organisasi umumnya berupaya menstabilkan dan mengendalikan lingkungan mereka untuk mengurangi stres dan ketidakpastian. Persyaratan bagi perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: kinerja yang terkait dengan biaya sosial, seperti keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan teknologi tepat guna, serta legitimasi sosial dan politik perusahaan swasta dalam kaitannya dengan negara dan masyarakat (Ullman, 1979). Dalam menjalankan bisnis, organisasi mempertimbangkan keseimbangan antara kinerja perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan pengaruh serta harapan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis yang sukses dalam lingkungan yang dinamis.

a. Teori legitimasi dan Kontak sosial

Menurut Burlea dan Popa (2013) , menyatakan bahwa teori legitimasi dipandang sebagai mekanisme yang membantu organisasi secara sukarela mengadopsi dan mengembangkan pengungkapan lingkungan dan sosial untuk memenuhi kontrak sosial mereka. Selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh Shocker dan Sethi (1973) perjanjian kemitraan ini berlaku untuk semua lembaga dan perusahaan sosial yang beroperasi di masyarakat. Kontrak sosial memungkinkan institusi sosial dan bisnis beroperasi di masyarakat. Ada hubungan eksplisit dan implisit antara bisnis dan masyarakat. Mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang



diinginkan bagi masyarakat secara keseluruhan dan mendistribusikan manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok-kelompok yang menjadi sumber kekuatan bagi lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan sosial tersebut akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Mekanisme pengakuan perusahaan diatur melalui perjanjian kemitraan antara organisasi dan perusahaan.

Zyznarska-Dworczak (2018) menyatakan bahwa teori legitimasi berpusat pada gagasan bahwa suatu perusahaan harus mempertahankan posisi sosialnya dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan apa yang diinginkan masyarakat.

Burlea dan Popa (2013) mengatakan perusahaan harus menghindari situasi di mana mereka merasa masyarakat tidak peduli dengan norma, standar, dan nilai-nilai mereka. Jika sebuah perusahaan tidak mematuhi prinsip-prinsip moral masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi, hal ini dapat mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri dan, dalam beberapa kasus, menyebabkan kegagalannya (Burlea-schiopoiu, 2013).

Menurut Burlea (2013), perusahaan usaha harus membuktikan eksistensinya melalui perilaku ekonomi dan sosial yang sah tanpa membahayakan masyarakat di mana mereka beroperasi. Hal ini karena teori legitimasi didasarkan pada gagasan bahwa harus ada konsensus sosial antara suatu perusahaan dan masyarakat di mana ia beroperasi, dan bahwa masyarakat mempunyai pengaruh tertentu terhadap keberhasilan bisnis suatu perusahaan bahwa mereka memenuhi peran mereka (Branco & Rodrigues, 2006). Tanpa masyarakat memberikan legitimasi kepada organisasi yang beroperasi di ruangnya, Branco dan Rodrigues (2006) menegaskan akan sulit bagi organisasi semacam itu untuk mempertahankan kepentingan pemangku kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mengingat peran yang dimiliki masyarakat terhadap potensi keberhasilan suatu

Organisasi, O'Donovan (2000) menyimpulkan bahwa organisasi yang sah adalah organisasi yang tindakannya dianggap oleh anggota masyarakat konsisten dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan yang dibangun secara sosial. Hal ini didasarkan pada peran masyarakat terhadap kemungkinan keberhasilan suatu organisasi.

b. Teori Legitimasi dan Pengungkapan

Perusahaan usaha secara sukarela melaporkan aktivitas mereka untuk terus memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan peraturan dan standar masyarakat. Seiring berjalannya waktu, menjadi semakin jelas bahwa masyarakat memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan bisnis. Sebagaimana telah disebutkan, peran masyarakat adalah memberikan legitimasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyadari bahwa mereka mempunyai kekhawatiran yang berkelanjutan. Abreu (2015) berpendapat bahwa jika masyarakat menilai suatu perusahaan melanggar aturan sosial, maka kelangsungan hidup perusahaan tersebut mungkin terancam.

Biasanya masyarakat tidak terlibat dalam perusahaan. Oleh karena itu, masyarakat mengandalkan laporan perusahaan untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan. Jika operasional suatu perusahaan mencakup produksi barang, seperti pertambangan, penggalian, kehutanan, atau perikanan, maka aktivitas bisnisnya dapat mengirimkan sinyal kepada masyarakat umum. Apakah suatu organisasi mengikuti teori legitimasi ditunjukkan oleh informasi dalam laporan sosial dan lingkungan perusahaan.

Menurut Mousa dan Hasan (2015), organisasi yang berupaya mendapatkan, mempertahankan, dan memperkuat legitimasi mereka menggunakan pengungkapan sosial dan lingkungan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai laporan perusahaan. Guthrie et al. (2006) Menghubungkan teori legitimasi dengan peningkatan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan organisasi.

Menurut Seckiln-Celik (2017), Bencana dan kecelakaan lingkungan, skandal akuntansi perusahaan, krisis ekonomi, dan isu serupa lainnya telah meningkatkan keterbukaan informasi sosial dan lingkungan. Menurut Das (2016), Krisis keuangan global dan ketidakstabilan pasar keuangan memaksa perusahaan untuk mengevaluasi kembali sistem nilai mereka dan menekankan pentingnya legitimasi. Jelas bahwa peristiwa-peristiwa di atas dan perkembangan-perkembangan lainnya memberikan tekanan yang sangat besar terhadap transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Porter dan Kramer (2011) Memberikan ide-ide untuk kelangsungan hidup organisasi yang mendukung ide-ide sebelumnya. Oleh karena itu, legitimasi diperlukan bagi perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Melaporkan isu-isu sosial dan lingkungan adalah salah satu cara untuk mendapatkan legitimasi.

Burlea dan Popa (2013) setuju dengan itu. Mereka percaya bahwa tantangan baru di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan akan mengharuskan pemerintah dan organisasi untuk secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan untuk menunjukkan kepatuhan.

c. GAP Legitimasi

Perusahaan tampaknya bersaing untuk mendapatkan legitimasi. Intinya, apa yang kita pelajari dari Guthrie et al. (2006) yaitu harapan masyarakat tidak bersifat permanen; mereka berkembang. Guthrie et al. (2006) menunjukkan bahwa pada suatu saat keselarasan antara perilaku kelembagaan dan nilai-nilai sosial dapat tercapai. Pandangan Guthrie et al. (2006) didukung oleh Islam (2017). Oleh karena



itu, proses legitimasi antar pihak yang berbeda akan terus menjadi sasaran karena peristiwa baru atau peristiwa yang dapat mengancam legitimasi perusahaan atau peristiwa yang sebelumnya mengancam legitimasi dapat terulang kembali.

Menurut Guthrie et al. (2006), Perusahaan yang tanggap terhadap lingkungan dianggap pragmatis. Berikutnya, kita perlu mengembangkan ekspresi yang menunjukkan bahwa kita sedang beradaptasi dengan dinamika lingkungan tempat kita tinggal.

Islam (2017) mengemukakan bahwa ada dua sumber utama kesenjangan legitimasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan ekspektasi masyarakat menyebabkan perubahan pada apa yang diharapkan dari suatu organisasi dan apa yang sebenarnya dapat dicapai oleh organisasi tersebut. Dalam konteks ini, Islam (2017) menyatakan bahwa “ekspektasi masyarakat akan berubah, sehingga menyebabkan kesenjangan.” Kesenjangan muncul karena praktik organisasi tidak berubah.
- b. Asimetri Informasi, perubahan tersebut merupakan akibat dari munculnya informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang organisasi (2017).

Nasi et al.(1997) bayangan suatu organisasi mengacu pada perubahan yang terjadi akibat munculnya informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang organisasi tersebut. Dengan demikian Nasi et al. (1997) Hal ini menunjukkan bahwa “berbagai informasi potensial tentang perusahaan yang tidak tersedia untuk umum menimbulkan potensi ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Oleh karena itu, informasi yang tidak dipublikasikan kepada publik ini diperkirakan akan menjadi bom waktu bagi reputasi organisasi. Hal ini membahayakan legitimasi organisasi. Untuk mengatasi hal ini, Lindblom (1994)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyarankan bahwa kesenjangan legitimasi perlu diatasi dengan tepat karena kesenjangan tersebut terkait dengan ancaman terhadap legitimasi organisasi.

Menurut Islam (2017), Organisasi perlu menerapkan strategi untuk mengatasi kesenjangan legitimasi. Organisasi yang tidak memiliki strategi legitimasi akan rentan dan situasinya menjadi lebih buruk ketika ancaman muncul. Fiedler dan Deegan (2007) menyatakan bahwa strategi tersebut dapat mencakup pengungkapan yang ditargetkan dan kolaborasi dengan pihak lain yang dianggap sah.

Menurut Lindblom (1994) ada empat jalur tindakan yang dapat diikuti organisasi untuk mempertahankan legitimasi. Organisasi dapat berusaha untuk:

- Mendidik dan menginformasikan pemangku kepentingan yang relevan tentang perubahan aktual dalam kinerja dan kegiatan organisasi;
- Mengubah persepsi publik yang relevan tetapi tidak mengubah perilaku aktualnya;
- Memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi perhatian ke masalah terkait lainnya; dan
- Mengubah ekspektasi eksternal terhadap kinerjanya

Apa artinya ini dalam praktik? Mousa dan Hassan (2015) menguraikan langkah-langkah praktis dari empat jalur tindakan yang disarankan oleh Lindblom (1994). Ini adalah di bawah ini:

- Organisasi dapat menyesuaikan output, tujuan, dan metode operasinya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku.
- Suatu organisasi dapat mencoba, melalui komunikasi, untuk mengubah definisi legitimasi sosial sehingga sesuai dengan praktik, output, dan nilai-nilai organisasi saat ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Organisasi dapat berusaha, melalui komunikasi, untuk diidentifikasi dengan simbol, nilai-nilai atau lembaga yang memiliki basis legitimasi yang kuat.
- d. Perusahaan mungkin berusaha untuk mencapai legitimasi dengan tampil melakukan hal yang benar atau tidak terlibat dalam melakukan hal yang salah ketika penampilan ini mungkin memiliki sedikit kesamaan dengan kinerja lingkungan aktual perusahaan

Menurut O'Donovan (2000), ketika legitimasi terancam, organisasi memulai proses legitimasi yang ditargetkan pada kelompok yang mereka anggap sebagai "negosiasi terbuka". Hal ini mengharuskan organisasi untuk benar-benar mengatasi masalah legitimasi. Islam (2017) menyarankan bahwa untuk manajemen legitimasi yang efektif, organisasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Mengidentifikasi publik yang menganugerahkannya;
- b. Menetapkan nilai-nilai sosial dan lingkungan publik yang menganugerahkan dan persepsi variabel tekanan publik korporasi;
- c. Memutuskan tujuan dari setiap respon organisasi potensial terhadap ancaman legitimasi; dan
- d. Memutuskan taktik dan opsi pengungkapan apa yang tersedia dan cocok untuk mengelola legitimasi terkait dengan tujuan respons organisasi (Azizul Islam, 2017).

Cormier dan Gordon (2001) mengingatkan kita bahwa legitimasi didasarkan pada pengakuan bahwa organisasi tersebut harus mengembangkan langkah-langkah perbaikan jika terjadi ledakan bom. Agar tindakan perbaikan dapat berdampak pada pemangku kepentingan eksternal, tindakan tersebut harus mengatasi masalah mendasarnya. Selain itu, tindakan perbaikan ini harus disertai dengan pengungkapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dipublikasikan. Akibatnya, Deegan (2002) menunjukkan bahwa penting untuk mengelola proses ini melalui pengungkapan perusahaan yang dipublikasikan dan dokumen publik lainnya.

2. Teori Pemangku Kepentingan

Freeman & David (1983) menggambarkan teori pemangku kepentingan sebagai hubungan antara pemangku kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang mempunyai kewajiban dan tidak dapat melanggarnya. Tujuan dari teori pemangku kepentingan adalah untuk membantu manajemen perusahaan mempertimbangkan secara optimal nilai dampak dari kegiatan yang dilakukan dan meminimalkan potensi kerugian pemangku kepentingan.

Definisi pemangku kepentingan mencakup arti luas dan sempit menurut Freeman dan David (1983). Dalam arti luas, pemangku kepentingan merupakan kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (misalnya kelompok kepentingan publik, kelompok protes, lembaga pemerintah, organisasi profesi profesional, pesaing, serikat pekerja). (serta karyawan, segmen pelanggan, pemegang saham, dll). Dalam arti sempit, pemangku kepentingan mengacu pada kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi yang menjadi sandaran kelangsungan hidup suatu organisasi (misalnya, karyawan, segmen pelanggan, pemasok tertentu, lembaga pemerintah utama, pemegang saham, lembaga keuangan tertentu, dll).

3. Teori Materialitas (*Materiality*)

Menurut M. Setiadi Hartoko (2019, hal.75), materialitas mengacu pada penghilangan atau salah saji data atau informasi yang disajikan, yang dapat dikenali berdasarkan keadaan di sekitarnya, dalam kaitannya dengan suatu hal akuntansi. informasi. Dan keadaan mempengaruhi dan mengubah penilaian. Sebagai pengguna



dan pembaca laporan perusahaan, investor atau calon investor yang mengandalkan informasi yang disajikan dalam laporan.

Dalam pelaporan keberlanjutan, materialitas merupakan prinsip untuk menentukan topik relevan mana yang cukup penting untuk dilaporkan. Tidak semua isu utama memiliki kepentingan yang sama dan fokus dalam laporan ini diharapkan mencerminkan prioritas relatif isu-isu tersebut. Berdasarkan pengertian dan definisi di atas, pertimbangan materialitas harus dilakukan dengan mempertimbangkan segala kondisi dan keadaan yang mempengaruhi perusahaan dan juga mencakup pertimbangan dari aspek kuantitatif dan/atau kualitatif. Definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan dapat dikelola dengan dua kata kunci: dampak dan risiko yang dapat diatribusikan kepada perusahaan, dan dampak yang dapat diatribusikan kepada perusahaan untuk diungkapkan kepada setiap pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan, yang tidak diatur dalam kenyataan. Tingkat kepentingan dan penekanan yang sama yang diharapkan dalam laporan dapat mencerminkan prioritas topik tergantung pada perusahaannya.

4. Teori Perubahan

Theory of change adalah Sebuah proses reflektif yang berkelanjutan untuk mengkaji perubahan dan kemunculannya serta apa pengaruhnya terhadap peran yang kita mainkan dalam konteks, sektor, dan/atau kelompok masyarakat tertentu (James, 2011). Ini menggambarkan bagaimana aktivitas dipahami untuk menghasilkan serangkaian hasil yang berkontribusi untuk mencapai efek akhir yang diinginkan. Hal ini dapat dikembangkan untuk intervensi di tingkat mana pun: peristiwa, proyek, program, kebijakan, strategi, organisasi (Gangloff, 2007). Terdapat beberapa tipe yang berbeda di dalam perubahan yang terjadi di lingkungan saat ini (Eguren, 2011).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Perubahan yang muncul, sebuah proses adaptif dan tidak teratur berdasarkan pembelajaran pengalaman, dan terjadi sebagai hasil dari perubahan yang tidak terduga dan / atau tidak direncanakan yang muncul dari dinamika yang disebut Kehidupan.
- b. Perubahan transformatif, perubahan ini didasarkan pada tidak belajar dan membebaskan diri dari pola pikir, hubungan, identitas, lembaga formal dan non-formal, dll. yang menghalangi dan menunda kemungkinan penetapan realitas baru yang lebih adil dan adil dalam hal ekonomi, sosial dan politik.
- c. Perubahan yang dapat diprediksi, perubahan yang didasarkan pada masalah yang rumit atau sederhana yang dapat diselesaikan melalui proyek-proyek tertentu dan tindakan yang direncanakan dari logika linear.

Saat merancang teori perubahan, fokusnya adalah mengubah paradigma yang mendefinisikan realitas. Tindakan untuk mengubah realitas berasal dari melihat realitas dengan cara baru. Dengan kata lain, kita berasumsi bahwa jika kita melihat cara kita berpikir dan bertindak secara berbeda dalam memecahkan dan mengelola permasalahan yang kompleks, kita dapat mencapai hasil yang berbeda (dan lebih baik) daripada yang dapat kita capai tanpa perubahan paradigma ini.

Diagram pada Gambar 2.1 di bawah ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan berkaitan dengan pendekatan strategis yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan melalui penerapan inisiatif yang disarankan dalam Teori Perubahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

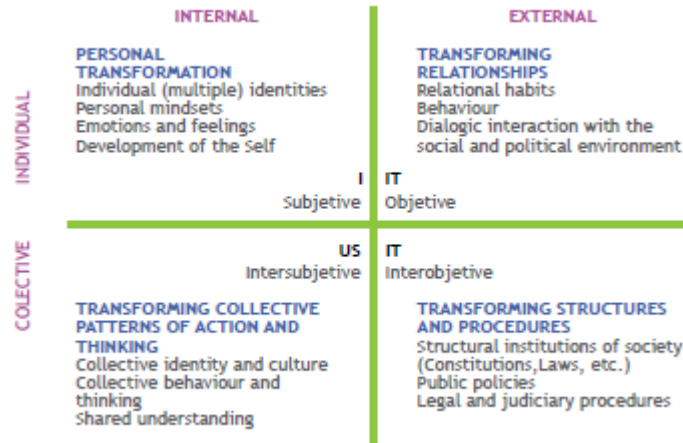
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2. 1

Empat dimensi terhadap perubahan sosial



Sumber: (Eguren, 2011)

Institusi adalah aturan main yang menentukan kepemimpinan suatu masyarakat, termasuk organisasi tertentu, atau kelompok sosial tertentu (misalnya suku, marga, atau perkumpulan sosial). Lembaga-lembaga ini bergantung pada mekanisme yang memenuhi dan mewajibkan penerapan serangkaian norma untuk menjamin terciptanya dan terpeliharanya kebaikan bersama. Ada dua jenis lembaga: formal dan informal.

- Lembaga formal, didasarkan pada norma tertulis dan mengatur hubungan dan prosedur formal yang mengatur masyarakat secara keseluruhan (yaitu konstitusi politik Negara, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dekrit menteri, dll) atau kelompok sosial atau perusahaan tertentu (yaitu prosedur administratif-bureaucratic dari perusahaan atau asosiasi produsen, yang ditetapkan oleh peraturan atau peraturan internal)
- Lembaga non-formal, Orang-orang, mekanisme, dinamika intangible dan tidak tertulis yang mengatur masyarakat atau kelompok sosial (yaitu korupsi sektor

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



publik, sistem hukum konsensual berdasarkan hukum kebiasaan, hubungan berdasarkan keturunan atau patronage, homofobia dan misogyny, reciprocity berbasis komunitas, diskriminasi dan rasisme, Gandhi di India, kewarganegaraan dan keluarga, dll.)

Perubahan merupakan suatu proses yang dinamis dan tidak bersifat permanen.

Artinya, mereka berkembang sebagai hasil interaksi dinamis dan muncul yang terus bergerak melalui fase berbeda. Meskipun kita dapat secara aktif mendorong interaksi tertentu dan merencanakan perubahan proses, hasil yang dihasilkan masih sangat tidak pasti dan tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Penyederhanaan didaktik dari proses dinamis ini adalah bahwa semua proses perubahan melewati empat fase utama dalam satu atau lain cara.

a. Fase Kepuasan (Kompetensi Tidak Sadar), di mana tidak ada dinamika perubahan yang diciptakan sejak, dan masih, tidak ada kesadaran tentang kebutuhan untuk perubahan. Orang telah memperoleh dan mengintegrasikan serangkaian model mental, perilaku, praktik institusi, kebiasaan budaya, dinamika relasional, dll. dan tidak merasa relevan atau perlu untuk diubah.

b. Fase Penolakan (Ketidakmampuan Tidak Sadar), da persepsi bahwa sesuatu tidak bekerja dengan baik dan sudah ada penyimpangan antara apa yang ada dan apa yang seharusnya. Namun, ada resistensi untuk mengubah status quo karena takut akan ketidakberdayaan yang tidak diketahui, perilaku dan intelektual, atau untuk apa yang diharapkan menjadi reconfiguration yang tidak diinginkan dari struktur kekuasaan.

c. Fase Kebingungan (Ketidakmampuan Sadar), para aktor termotivasi untuk melakukan perubahan setelah resistensi awal diatasi. Ini mungkin terjadi karena para aktor yang puas tidak dapat lagi tinggal di fase itu karena tekanan massa kritis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak puas yang menuntut perubahan (motivasi ekstrinsik). Atau, sekelompok

C individu merasakan kebutuhan untuk perubahan karena situasi pribadi mereka (kemiskinan, pengecualian, dll.) dan datang bersama-sama mengklaim perubahan. (intrinsic motivation). Namun, tidak terlalu jelas bagaimana untuk maju atau arah apa yang harus diambil karena proses perubahan begitu baru, tidak diketahui, dan tidak pasti. Aktor yang berbeda tidak dapat sepakat tentang apa jalan untuk perubahan. Atau mereka mungkin merasa kurang kompetensi untuk melakukan perubahan yang diinginkan dan perlu mengembangkan kapasitas baru untuk perubahan.

d Fase Renovasi (Kompetensi Sadar), Mulai dari kebutuhan eksplisit dan sadar untuk mengembangkan alternatif baru, ada pergerakan menuju dinamika kebajikan yang didukung oleh massa kritis. Kebutuhan untuk perubahan diterima secara individu dan sosial; dan konteks baru ini membantu pengembangan kondisi yang diperlukan untuk perubahan yang diinginkan terjadi. Ada awal dari proses perubahan, transformasi dan pembaharuan yang berhasil mengkonsolidasikan fondasi untuk perubahan. Sistem ini mampu mengkonfigurasi kembali dinamika keseimbangan dan, secara bertahap, ada kemajuan menuju urutan baru.

Dalam setiap proses partisipatif, terdapat hubungan langsung antara penggunaan kekuasaan, basis pengetahuan, dan identitas, yang mempengaruhi posisi dan kepentingan mereka yang terlibat. Seperti yang akan kita lihat, aktor-aktor yang berbeda dapat menggunakan kekuasaan dengan cara yang berbeda-beda.

Beberapa dinamika kekuasaan berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai jenis pengetahuan yang ada di antara para aktor yang terlibat dalam proses tersebut dengan cara (yang lebih) horizontal dan integratif. Sebaliknya, penggunaan kekuatan represif oleh penguasa dapat membatasi kemungkinan untuk mengakui dan mengakui identitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan jenis pengetahuan tertentu sebagai sesuatu yang valid dan relevan. Misalnya, kurangnya pengakuan dan inklusi pengetahuan adat dalam proses pengambilan keputusan yang didominasi oleh lembaga pemerintah yang berorientasi Barat atau cenderung diskriminatif, serta kurangnya penilaian dan integrasi pengetahuan perempuan dalam pengambilan kebijakan mempengaruhi kelompok sasaran sosial ini.

Dan pemerintah daerah serta para insinyur menolak untuk mempertimbangkan inisiatif warga sebagai alternatif terhadap proposal resmi untuk hal-hal seperti jalan umum, kebijakan sosial, dan pembangunan taman lingkungan (perencanaan kota).

5. Environmental, Social, and Governance (ESG)

Environment, Social, and Governance (ESG) pada dasarnya adalah sebuah taksonomi komprehensif yang mendefinisikan persyaratan non-finansial suatu organisasi (Krishnamoorthy, 2021). ESG merupakan upaya pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan (Almeyda & Darmansya, 2019). ESG menggambarkan serangkaian faktor yang digunakan untuk mengukur dampak non-finansial dari suatu investasi atau perusahaan tertentu.

Pada saat yang sama, ESG juga menawarkan berbagai peluang bisnis dan investasi (Starks, 2021). Meskipun informasi ESG mungkin tidak terstandarisasi, para ahli berpendapat bahwa informasi tersebut dapat membantu perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan bahkan menjadi bagian dari strategi kompetitif perusahaan (Giannopoulos et al., 2022).

Pengungkapan ESG merupakan bentuk terkini dalam evolusi pelaporan informasi sukarela, yang dimulai dengan pelaporan CSR, kemudian berkembang menjadi pelaporan keberlanjutan dan kemudian pelaporan terintegrasi (Faisal, 2018). ESG mencakup ukuran komprehensif informasi keberlanjutan perusahaan. Skor ESG terdiri dari tiga dimensi: lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola, yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



digabungkan menjadi satu skor. Setiap dimensi memiliki metrik tersendiri untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan suatu perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan baru yang mencakup ketiga dimensi tanggung jawab sosial perusahaan ini, investor dapat menggunakan ESG Score sebagai alat penilaian yang lebih komprehensif terhadap kinerja keberlanjutan suatu perusahaan (Zuraida et al., 2015).

Environment, Social, and Governance (ESG) adalah kerangka kerja untuk mengevaluasi praktik bisnis dan kinerja organisasi dalam berbagai masalah keberlanjutan dan tanggung jawab. Investasi ESG adalah seperangkat standar perilaku perusahaan yang digunakan oleh investor yang sadar sosial untuk mengevaluasi investasi potensial. Kecepatan pelaporan indikator-indikator ESG menunjukkan momentum yang luar biasa. Sebagai respons terhadap kesenjangan antara permintaan investor terhadap informasi ESG dan penyediaan informasi tersebut oleh perusahaan, beberapa negara telah memberlakukan kewajiban pengungkapan ESG, yang mengharuskan perusahaan untuk memaksa sektor lain untuk memberikan informasi berkualitas mengenai topik-topik ESG. Publikasikan laporan independen khusus. Selain upaya nasional tersebut, upaya signifikan juga sedang dilakukan di tingkat global untuk merancang, menyelaraskan, dan pada akhirnya mewajibkan standar pengungkapan ESG internasional (Krueger et al., 2021).

a. Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan organisasi yang menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang dapat diadopsi oleh semua jenis organisasi di semua negara. GRI didirikan pada tahun 1997 oleh organisasi nirlaba Amerika yaitu *Coalition for Environmentally Responsible*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Economics (CERES) dan *Tellus Institute*, dengan dukungan dari *United Nations Environment Programme (UNEP)*. GRI adalah organisasi berbasis web dengan sekretariat pusatnya di Amsterdam, Belanda. Tugas sekretariat adalah mengkoordinasikan mitra jaringan GRI. GRI memiliki kantor regional dan titik fokus di Australia, Brasil, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jaringan global mencakup lebih dari 600 organisasi pemangku kepentingan dan sekitar 30.000 pendukung inti yang mewakili berbagai sektor dan konstitusi.

Pedoman laporan *Global Reporting Initiative (GRI)* merupakan dasar kerangka pelaporan keberlanjutan GRI. Pedoman pelaporan GRI diterbitkan pada tahun 2006. Setelah pedoman tersebut diterbitkan, pemerintah mengusulkan revisi dan versi final GRI 4 diterbitkan pada Mei 2013.

Pedoman GRI G4 diterbitkan pada bulan Mei 2013 dan merupakan versi terbaru dari Pedoman GRI untuk Pelaporan Tanggung Jawab Perusahaan. Namun, organisasi pelapor (Perusahaan) yang masih menggunakan panduan G3 atau G3.1 dapat memutuskan sendiri kapan akan beralih ke panduan G4 jika periode pelaporannya adalah tanggal 31 Desember 2015. Setelah tanggal 31 Desember 2015, laporan yang dipublikasikan harus disiapkan. sesuai dengan pedoman G4. Oleh karena itu, GRI tetap mengakui laporan berdasarkan pedoman G3 dan G3. G4 bertujuan untuk membantu pelapor (whistleblower) menghasilkan laporan keberlanjutan yang bermakna - dan menjadikan pelaporan keberlanjutan yang berkelanjutan dan tepat sasaran sebagai praktik umum. Pedoman G4 disajikan dalam dua bagian:

1) Prinsip-prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar

Berisi prinsip-prinsip pelaporan, informasi standar dan kriteria yang diterapkan organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutannya sesuai



dengan pedoman tersebut. Definisi istilah-istilah penting juga disertakan di sini.

2) Panduan penerapan

Berisi penjelasan mengenai penerapan prinsip-prinsip pelaporan, penyusunan keterbukaan informasi dan panduan interpretasi berbagai konsep. Juga mencakup referensi ke sumber lain, daftar istilah dan pedoman pelaporan umum.

Pada saat yang sama, panduan pelaporan keberlanjutan menerapkan dua opsi, yaitu: opsi dasar dan opsi komprehensif. Setiap opsi dapat diterapkan pada semua organisasi, terlepas dari ukuran, industri, atau lokasinya. Inti dari kedua pilihan ini adalah proses mengidentifikasi aspek-aspek penting. Aspek material adalah aspek yang mencerminkan dampak signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi; atau hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi penilaian dan keputusan para pemangku kepentingan.

Varian dasar berisi bagian-bagian utama laporan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan inti mencakup latar belakang yang mendasari dampak keuangan, lingkungan, dan sosial organisasi serta pengungkapan hasil pengelolaan. Opsi komprehensif ini dibangun berdasarkan opsi inti, yang memerlukan standar tambahan dalam strategi dan analisis, kepemimpinan serta etika dan integritas organisasi. Selain itu, organisasi diminta untuk mengungkapkan kinerjanya secara lebih luas dengan menyajikan seluruh indikator terkait aspek-aspek penting yang teridentifikasi.

Standar GRI menawarkan pengungkapan tentang berbagai topik keberlanjutan. Dari anti-korupsi hingga air, biodiversitas hingga kesehatan dan keselamatan kerja, Standar ini mencakup topik yang relevan di seluruh dimensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ekonomi, lingkungan dan sosial. Organisasi memilih dari antara mereka untuk melaporkan dampak signifikan mereka. Standar GRI sering diperbarui untuk memperbarui topik yang ada saat mereka berkembang dan untuk mencakup topik baru. Standar GRI disusun sebagai serangkaian standar yang saling terkait. Ada tiga standar universal yang berlaku untuk setiap organisasi yang mempersiapkan laporan keberlanjutan. Sebuah organisasi kemudian memilih dari set Standar GRI khusus topik untuk melaporkan pada topik materialnya. Standar-standar GRI yang spesifik dibagi menjadi tiga seri: 200 (Ekonomi), 300 (Lingkungan), dan 400 (Sosial).

1) 100 Series – Universal Standards

Standar Universal mendukung organisasi dalam mengidentifikasi topik-topik pentingnya, dan menetapkan prinsip-prinsip penting yang harus digunakan saat mempersiapkan laporan. Mereka juga berisi pengungkapan tentang konteks spesifik organisasi, seperti ukuran, kegiatan, pemerintahan, dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang semuanya membantu untuk lebih memahami pendekatan terhadap berbagai topik yang dilaporkan.

2) 200 Series – Economic

Dalam konteks Standar GRI, dimensi ekonomi keberlanjutan mengacu pada dampak organisasi pada kondisi ekonomi para pemangku kepentingan, dan pada sistem ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan global. Ia tidak berfokus pada kondisi keuangan sebuah organisasi.

3) 300 Series – Environmental

Dalam konteks Standar GRI, dimensi lingkungan dari keberlanjutan mengacu pada dampak organisasi pada sistem alam hidup dan non-hidup, termasuk darat, udara, air dan ekosistem.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) 400 Series – Social

Dalam konteks Standar GRI, dimensi sosial keberlanjutan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem sosial di mana ia beroperasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi dampak lingkungan dari seluruh kegiatan sosial dan ekonomi (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Artinya, segala kegiatan sosial dan ekonomi harus menghindari/mencegah atau memperhitungkan dampak terhadap kondisi lingkungan hidup agar lingkungan hidup dapat tetap menjalankan fungsi penunjang kehidupannya pada saat ini dan di masa yang akan datang. Komitmen terhadap SDGs didasarkan pada Agenda 21 yang memperkuat komitmen terhadap Millennium Development Goals (MDGs) atau dikenal juga dengan MDGs Plus dan menekankan pada visi pembangunan berkelanjutan dan konsep SDGs menyoroti visi bersama yaitu:

- 1) Komprehensif: didasarkan pada tiga pilar: Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan serta Pilar Tata Kelola;
- 2) Tematik: terdiri dari 17 goals;
- 3) Holistik dan terintegrasi: ke 17 tujuan tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dan terintegrasi;
- 4) Inklusif: tidak ada satu pihakpun yang tertinggal (*no one left behind*);
- 5) Kolaborasi (kemitraan); membutuhkan kerjasama yang erta dari seluruh pemangku kepentingan; pemerintah, dunia usaha, LSM, universitas dan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah serangkaian 17 tujuan global yang saling terkait yang ditetapkan oleh PBB untuk mengatasi berbagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tantangan, termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai cetak biru bersama untuk perdamaian dan kesejahteraan bagi manusia dan bumi, saat ini dan di masa depan. Setiap tujuan memiliki target dan indikator khusus untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030.

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan masing-masing target pencapaiannya (Nations, 2015).

- 1) *Goal 1: No Poverty, End poverty in all its forms everywhere.*
- 2) *Goal 2: Zero Hunger, End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.*
- 3) *Goal 3: Good Health and Well-being, Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.*
- 4) *Goal 4: Quality Education, Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.*
- 5) *Goal 5: Gender Equality, Achieve gender equality and empower all women and girls.*
- 6) *Goal 6: Clean Water and Sanitation, Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all.*
- 7) *Goal 7: Affordable and Clean Energy, Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.*
- 8) *Goal 8: Decent Work and Economic Growth, Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- 9) *Goal 9: Industry, Innovation, and Infrastructure, Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.*
- 10) *Goal 10: Reduced Inequalities, Reduce inequality within and among countries.*
- 11) *Goal 11: Sustainable Cities and Communities, Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.*
- 12) *Goal 12: Responsible Consumption and Production, Ensure sustainable consumption and production patterns.*
- 13) *Goal 13: Climate Action, Take urgent action to combat climate change and its impacts.*
- 14) *Goal 14: Life Below Water, Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.*
- 15) *Goal 15: Life on Land, Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss.*
- 16) *Goal 16: Peace, Justice, and Strong Institutions, Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.*
- 17) *Goal 17: Partnerships for the Goals, Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.*

Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global 2019 mengemukakan kerangka kerja organisasi untuk transformasi yang diperlukan untuk mencapai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sustainable Development Goals dengan mengusulkan enam titik masuk masuk (United Nations, 2023).

- 1) *Human well-being and capabilities*, Kesejahteraan material dan kelangsungan hidup, kesehatan, keamanan, pendidikan, suara dan pemberdayaan, dan akses ke lingkungan yang bersih dan aman adalah semua bagian dari kemakmuran manusia. Ketika kebutuhan dasar orang terpenuhi, mereka mengembangkan kemampuan untuk mendorong kemajuan dan transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan global.
- 2) *Sustainable and just economies*, Perkembangan dan aktivitas ekonomi berharga karena dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia, bukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Status quo ekonomi saat ini didefinisikan oleh ketidaksetaraan yang parah dan kehancuran lingkungan, dan untuk bergerak menuju sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil, perubahan besar dalam cara orang hidup, bekerja, memproduksi dan mengonsumsi akan diperlukan.
- 3) *Sustainable food systems and healthy nutrition*, Sistem makanan saat ini adalah kombinasi kompleks dari sistem pertanian, pengolahan, perdagangan dan transportasi lokal, nasional, regional dan global yang tidak berkelanjutan, dan sistem ritel, dengan hubungan yang jelas dengan masalah kesehatan dan ekuitas di seluruh dunia. Pergeseran ke sistem makanan yang berkelanjutan akan membutuhkan perubahan mendalam dalam produksi, distribusi, ritel, konsumsi, diet, menangani limbah makanan dan kerugian termasuk penggunaan ulang.
- 4) *Energy decarbonization*, Agenda 2030 berkomitmen untuk akses universal ke energi dan dekarbonisasi sumber energi di seluruh dunia. Mengatasi

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



krisis iklim akan berarti menjauh dari bahan bakar fosil dan menghentikan penggunaan bahan bakar padat yang mengganggu untuk memasak, yang sangat penting untuk menghindari 3,8 juta kematian tahunan saat ini karena polusi udara dalam ruangan.

- 5) *Urban and peri-urban development*, Setengah dari populasi dunia sekarang tinggal di kota, dan urbanisasi diperkirakan akan meningkat. Keadilan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan kohesi, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas di daerah perkotaan dan peri urban. Ini juga akan penting untuk memulihkan daerah pedesaan.
- 6) *Global environmental commons*, Pencapaian seluruh Agenda 2030 akan tergantung pada perlindungan sumber daya bersama – atmosfer, hidrosfer, lautan global, kriosfer, wilayah kutub, hutan, darat, air tawar dan keanekaragaman hayati.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

c. Aspek Material dan Boundary

Aspek material dan batasan merupakan bagian dari informasi standar yang diberikan oleh Global Reporting Initiative (GRI) pada indikator G4-17 hingga G4-23. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran lengkap tentang proses yang diikuti oleh organisasi untuk menentukan isi laporan, aspek material, batasan yang diidentifikasi, dan penyajian kembali (GSSB, 2013). Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menentukan aspek dan batasan penting.

1) Langkah 1: Identifikasi

- a) Pertimbangkan daftar Aspek GRI dan topik penting lainnya.
- b) Terapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Identifikasi Aspek – dan topik relevan lainnya –

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

berdasarkan dampak yang relevan terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan semua kegiatan, produk, layanan, dan hubungan organisasi, atau pada pengaruh yang dimilikinya terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.

- c) Identifikasi tempat terjadinya dampak: di dalam atau di luar organisasi.
- d) Cantumkan Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan, serta *Boundary*.

2) Langkah 2: Prioritasi

- a) Terapkan Prinsip Materialitas dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Nilai setiap Aspek dan topik lainnya yang dianggap relevan pada: signifikansi dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi, serta pengaruh terhadap asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.
- b) Identifikasi Aspek Material dengan menggabungkan asesmen tersebut.
- c) Tentukan dan dokumentasikan nilai ambang (kriteria) untuk menentukan sebuah Aspek menjadi material.
- d) Untuk setiap Aspek Material yang teridentifikasi, putuskan tingkat cakupan, jumlah data, dan penjelasan naratif yang akan diungkapkan.
- e) Cantumkan Aspek Material yang akan disertakan dalam laporan, beserta *Boundary* dan tingkat cakupannya.

3) Langkah 3: Validasi

- a) Terapkan Prinsip Kelengkapan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan: Lakukan asesmen pada daftar Aspek Material terhadap Cakupan, Aspek *Boundary*, dan Periode untuk memastikan bahwa laporan tersebut memberikan representasi yang wajar dan seimbang dari dampak ekonomi,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi.

- b) Setujui daftar Aspek Material yang teridentifikasi bersama pembuat keputusan senior internal yang relevan.
- c) Siapkan sistem dan proses untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk diungkapkan.
- d) Terjemahkan Aspek Material teridentifikasi menjadi Pengungkapan Standar – DMA dan Indikator – sebagai dasar laporan.
- e) Tentukan informasi yang tersedia dan jelaskan mana yang masih diperlukan untuk membuat pendekatan manajemen dan sistem pengukuran.

4) Langkah 4: Reviu

- a) Terapkan Prinsip Konteks Keberlanjutan dan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan: Tinjau Aspek yang penting dari pelaporan periode sebelumnya.
- b) Gunakan hasil reviu untuk menjelaskan Langkah 1 Identifikasi untuk siklus pelaporan berikutnya.

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017

Otoritas Jasa Keuangan (2017) telah menerbitkan Peraturan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mengatur pelaporan keberlanjutan kepada perusahaan seperti lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan tercatat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), laporan keberlanjutan adalah laporan yang tersedia untuk umum yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, atau perusahaan publik dalam mengelola operasional berkelanjutannya.



Dalam aturan tersebut, OJK menetapkan beberapa informasi yang wajib dimuat dalam laporan keberlanjutan:

1) Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas menjelaskan strategi keberlanjutan yang diterapkan.

2) Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas membuat perbandingan dari kinerja entitas selama 3 tahun terakhir, dari segi ekonomi (kuantitas produk/ jasa, pendapatan, dsb.), segi lingkungan (penggunaan energi, pengurangan emisi, limbah dsb.) dan aspek sosial (dampak bagi masyarakat dan lingkungan).

3) Profil Singkat

Pada bagian ini, entitas memberi gambaran mengenai karakteristik entitas, seperti visi, misi, alamat dan media untuk menghubungi entitas, serta skala usaha, produk/ jasa, dsb.

4) Penjelasan Direksi

Pada bagian ini, entitas menjelaskan kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi strategi keberlanjutan yang dicanangkan, penerapan yang telah dilakukan, serta strategi untuk mencapai target.

5) Tata Kelola Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas menjelaskan uraian tugas yang diemban oleh penanggung jawab keberlanjutan entitas, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan, prosedur dalam menangani risiko penerapan keberlanjutan terkait segi lingkungan, ekonomi dan sosial, serta penjelasan pemangku kepentingan dan permasalahan maupun perkembangan yang dihadapi.

6) Kinerja Keberlanjutan



Pada bagian ini, entitas menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam membangun budaya keberlanjutan, perbandingan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosial selama 3 tahun terakhir, serta tanggung jawab pengembangan produk/ jasa.

7) Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen, jika ada

e. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

1) Awal mula berdirinya proper

Awal mula PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan) diluncurkan pada tahun 1989 dan kemudian dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 Tahun 1995. PROKASIH pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki kualitas air sungai yang sudah dinyatakan tercemar. Konsep sederhana itulah yang menjadi landasan lahir dan berkembangnya PROPER, yang kini telah berkembang jauh melampaui konsep awal saat PROKASIH pertama kali diluncurkan.

Pada tahun 2002, Kementerian Lingkungan Hidup mengubah PROKASIH menjadi PROPER sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 127/MENLH/2002. PROPER bertujuan untuk mendorong perusahaan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang baik. Jika sistem perusahaan baik maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam mengurangi produksi limbah. Setelah menerima data absolut, perusahaan dapat membandingkan hasil absolut yang diperoleh dengan hasil absolut perusahaan lain (benchmarking). Hal ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan, apakah paling efektif atau tidak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pemberdayaan masyarakat dan mempengaruhi tekanan pasar dilakukan dengan menyebarkan informasi yang dapat dipercaya sedemikian rupa sehingga dapat menyebabkan naik turunnya reputasi perusahaan, atau naik turunnya reputasi perusahaan/industri. Informasi mengenai kinerja perusahaan disampaikan melalui simbol-simbol berwarna sehingga masyarakat dapat menerima informasi tersebut. Berikut beberapa simbol warna yang ditetapkan berdasarkan penilaian nilai kinerja usaha/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup:

- a) Emas diberikan kepada perusahaan dan/atau kegiatan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa serta bisnis yang beretika dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- b) Hijau ditujukan bagi perusahaan dan/atau perusahaan yang telah menerapkan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketentuan peraturan (kepatuhan berlebihan) dengan menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan menggunakan sumber daya secara efisien serta memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik.
- c) Biru diperuntukkan bagi perusahaan dan/atau kegiatan yang telah menerapkan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Merah diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup, namun belum memenuhi persyaratan yang timbul dari peraturan perundang-undangan.
- e) Hitam diberikan kepada mereka yang melakukan usaha dan/atau dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak memenuhi sanksi administratif. (Proper, 2015)

2) Mekanisme Penilaian PROPER

Pelaksanaan PROPER diawali dengan pemilihan perusahaan peserta, dimana perusahaan yang disasar sebagai peserta PROPER adalah perusahaan yang mempunyai dampak lingkungan hidup yang signifikan, terdaftar di bursa, memiliki produk berorientasi ekspor atau perusahaan yang menggunakannya. masyarakat luas.

Setelah peserta teridentifikasi, dilakukan pengumpulan data *self-review* dengan mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Selain data swadaya, data primer juga dikumpulkan pada saat pemantauan langsung lapangan secara berkala oleh Petugas Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH). Data yang terkumpul kemudian diolah menjadi laporan sementara yang berisi penilaian terhadap kegiatan perusahaan di bidang pengelolaan limbah air, udara dan B3 dibandingkan dengan kriteria penilaian PROPER yang telah ditetapkan.

Rapor sementara ini memberikan penilaian perusahaan berdasarkan kriteria pemeringkatan yang BENAR. Tim teknis kemudian membahas rapor interim melalui mekanisme peer review. Hasil pembahasan akan dilaporkan kepada pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapat masukan dan pertimbangan. Rapor tersebut kemudian diteruskan ke Komite Penasihat untuk mendapatkan pendapat dan persetujuan. Kartu gambar hasil diskusi dengan dewan kemudian ditetapkan sebagai kartu gambar sementara yang diserahkan kepada perusahaan dan pemerintah provinsi. Perusahaan dan otoritas daerah akan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan informasi baru yang valid. Pada akhir periode keberatan, hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan. Dewan membuat laporan akhir pendapatan perusahaan sebelum melaporkannya kepada menteri.

Menteri meninjau, menyiapkan tindakan dan menentukan status investasi perusahaan yang menguntungkan, dengan mempertimbangkan laporan dewan. Ketika semua proses selesai, laporan nilai kinerja perusahaan diterbitkan, yang dikomunikasikan kepada publik serta perusahaan dan pemerintah kota. (Proper, 2015)

3) Kriteria Penilaian PROPER

Penyusunan kriteria terkait pelaksanaan PROPER dilakukan oleh tim teknis yang memperhatikan masukan dari berbagai pihak, antara lain: pemerintah daerah kabupaten/kota kota, asosiasi industri, perusahaan, LSM, perguruan tinggi, instansi terkait. de

Kriteria penilaian yang BENAR terdiri dari dua kategori yaitu

a) Kriteria penilaian ketaatan

Kriteria penilaian kesesuaian menjawab pertanyaan sederhana: apakah perusahaan telah mematuhi peraturan Dewan Lingkungan Hidup? Aspek penilaian kesesuaian meliputi: izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, perlindungan lingkungan hidup. pengendalian polusi udara; pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan kemungkinan kerusakan lahan (terutama akibat pertambangan). Garis yang dibuat pada langkah ini berwarna biru, merah dan hitam. Fase ini disebut juga fase eksekusi.

b) Kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kriteria *beyond compliance* bersifat lebih dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan teknologi, penerapan praktik pengelolaan lingkungan terbaik, dan permasalahan lingkungan hidup global. Kriteria tambahan mengevaluasi aspek-aspek berikut: Penerapan sistem manajemen lingkungan; Langkah-langkah efisiensi energi; Menghemat air dan mengurangi polusi kotor; Konservasi keanekaragaman hayati; dan program pengembangan masyarakat. Upaya pengurangan emisi; Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang limbah B3 dan non-B3. Fokus dari kriteria ini adalah semakin banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah, maka semakin besar nilainya. Selain itu, semakin banyak pemborosan yang dihilangkan, semakin banyak nilai yang diterima perusahaan. Level ini disebut juga dengan level pemenuhan tambahan, yang levelnya dapat dicapai: HIJAU atau EMAS.

Khususnya untuk program pemberdayaan, perusahaan harus memiliki program strategis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini berbasis pada pemetaan sosial yang menggambarkan jaringan sosial yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antar kelompok/individu. Rencana strategis pengembangan masyarakat harus bersifat jangka panjang dan rinci. Program harus menanggapi kebutuhan kelompok rentan dan harus disertai dengan indikator untuk mengukur pencapaian program secara terukur. Tentu saja seluruh proses perencanaan harus melibatkan anggota masyarakat (Proper, 2015).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Evaluasi Kinerja Penilaian PROPER

Evaluasi kinerja penaatan lingkungan dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Penilaian Langsung: Dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi lapangan dan pelaporan kejadian.
- b) Penilaian tidak langsung (mandiri).

Penilaian tidak langsung dilakukan dengan memeriksa isi laporan kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan terkait dimulai dengan tahap persiapan dari Januari hingga Maret. Persiapan dimulai dengan alokasi peserta PROPER dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing provinsi. Peningkatan kapasitas PROPER juga ditawarkan kepada provinsi-provinsi pelaksana yang melaksanakan PROPER. Setelah tahap pendahuluan, provinsi melakukan pemeriksaan lapangan sebanyak 3 tahap dan setiap tahap diperiksa oleh tim KLH untuk memastikan tetap terjaganya baku mutu PROPER di setiap provinsi. Proses pemantauan menghasilkan ringkasan pemeringkatan dan rapor sementara. Setelah itu, perusahaan dapat mengirimkan pembatalan hasil laporan sementara. (Proper, 2015)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Social Return on Investment (SROI)

SROI merupakan metode untuk mengukur nilai (dampak) yang tercipta dari tiga perspektif: sosial, lingkungan, dan ekonomi (Purwohedi et al., 2023). SROI mengukur nilai uang (moneter) dari manfaat sosial dan membandingkan manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dari sektor publik dan swasta. Keberhasilan suatu program CSR tentunya dapat diukur dari manfaat yang diberikannya kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mengukur dampak sosial dari program CSR adalah laba atas investasi sosial (SROI). Mengukur program

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



CSR membantu perusahaan memahami cara mereka mengelola nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang mereka hasilkan. Dengan menggunakan SROI, perusahaan menyadari nilai program CSR mereka, terutama dampak positifnya terhadap masyarakat, dan efektivitas investasi sosial yang telah mereka lakukan.

Jumlah investasi yang dilakukan perusahaan untuk mendukung kegiatan CSR penerima manfaatnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Kinerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkuat kegiatan pengukuran dampak. Pengukuran dampak membantu perusahaan memahami dampak (hasil) program yang dilaksanakan dan perspektif subjektif penerima manfaat. Instrumen pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program yang dilaksanakan adalah SROI (Social Return on Investment).

Analisis SROI merupakan analisis yang dilakukan dengan menetapkan dampak dan menilai dampak tersebut dengan menggunakan *financial proxy* dan pembobotan. Hasil rasio yang telah dihitung dari analisis SROI ini menunjukkan satu rupiah yang telah diinvestasikan akan menghasilkan dampak dengan nilai rasio yang dihasilkan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam analisis SROI (Purwohedo et al., 2023).

- 1) Menetapkan ruang lingkup dan mengidentifikasi para pemangku kepentingan (*Establishing scope and identifying stakeholders*)
 - a) Menentukan ruang lingkup (*Establishing scope*)

Ruang lingkup (*scope*) mencakup seluruh informasi yang diperlukan yang terkait dengan program/proyek yang akan dianalisis. Ruang lingkup akan memberikan suatu gambaran utuh tentang karakteristik program/proyek kepada pengguna laporan SROI. Sebelum memulai analisis, sangat penting

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagi seorang praktisi SROI untuk bertemu dan membahas bersama sama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan aktivitas, pembiayaan (*funding*) tujuan dari aktivitas (*objectivity of activity*), maksud dari analisis (*purpose of analysis*), periode waktu (*time period*), dan prediksi atau evaluasi (*forecast of evaluation*).

b) Mengidentifikasi pemangku kepentingan (*Stakeholders*)

Salah satu langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan siapa pemangku kepentingan yang akan dilibatkan dalam analisis SROI. Pemangku kepentingan adalah orang (atau sekelompok orang) ataupun organisasi yang merasakan perubahan, baik positif maupun negatif sebagai akibat dari program/proyek yang sedang dianalisis.

2) Menetapkan dampak (*Mapping outcomes*)

a) Identifikasi *input* dan pemberian nilai *input*

Input dalam SROI terdiri dari tiga jenis, yaitu uang, waktu, dan barang. Ketiga hal tersebut adalah sumber daya yang diperlukan bagi sebuah program/proyek untuk dapat dijalankan. Oleh karena itu, SROI ingin memastikan bahwa ketiga hal tersebut diperhitungkan sebagai nilai investasi.

b) Mengklarifikasi *output*

Output menunjukkan sebuah dampak yang segera dapat terlihat/dirasakan dari adanya sebuah program/proyek. Praktisi SROI harus menentukan secara jelas *output* dari program/proyek yang akan dianalisis. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti melalui observasi, telaah pustaka, *interview*, maupun diskusi dengan para pemangku kepentingan.

c) Menentukan manfaat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menentukan manfaat apa saja yang telah dirasakan oleh penerima manfaat setelah sebuah fasilitas beroperasi atau sebuah program dijalankan. Praktisi SROI harus dapat mendengar dengan seksama setiap pendapat penerima manfaat (*stakeholders* yang paling relevan) tentang perubahan apa yang telah dirasakan setelah sebuah fasilitas berdiri atau suatu program dijalankan.

3) Membuktikan adanya dampak dan memberinya nilai (*Evidencing outcomes and giving them a value*)

a) Indikator

Indikator adalah sesuatu kejadian atau fakta di lapangan yang dapat dijadikan dasar bagi pengguna SROI bahwa perubahan itu memang benar adanya.

b) Ukuran keuangan (*Financial proxy*)

Tahapa ini merupakan tahapan yang paling krusial dalam implementasi SROI karena nilai nominal dari suatu *outcome* merupakan salah satu kelebihan SROI yang tidak dimiliki alat analisis lain, tetapi di sisi lain juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Setiap *outcome* akan memiliki *financial proxy* yang akan digunakan untuk menghitung total *outcome* (*benefit*) suatu program/proyek.

c) Jangka waktu (*Duration*)

Jangka waktu yang dimaksud adalah seberapa lama kira-kira penerima manfaat dari suatu program/fasilitas akan merasakan dampak dari program tersebut. dengan kata lain, seberapa lama penerima manfaat akan dapat merasakan berbagai perubahan positif secara signifikan.

4) Menetapkan dampak (*Establishing impact*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nilai suatu dampak yang telah ditentukan berapa besar nilai nominalnya pada tahap sebelumnya (penentuan *financial proxy*), harus melalui 4 bentuk filter yang akan menghasilkan nilai yang disesuaikan (*adjusted value*) sebagai *proxy* nilai nominal yang akan digunakan.

- a) *Deadweight*: apakah dampak ini akan terjadi begitu saja?

Deadweight artinya seberapa besar suatu dampak akan terjadi begitu saja tanpa perlu adanya suatu program/proyek.

- b) *Attribution*: siapa lagi yang berkontribusi terhadap dampak ini?

Attribution menunjukkan bahwa fasilitas tersebut bukan satu-satunya yang berkontribusi pada penciptaan dampak. Yang berkontribusi pada dampak, dapat bersumber dari pihak lain, program lain atau fasilitas lain yang dirasakan oleh penerima manfaat.

- c) *Displacement*: apakah dampak menggantikan kebiasaan baik lain?

Displacement pada dasarnya menjawab pertanyaan apakah ada kegiatan positif lain yang justru tergantikan setelah adanya program atau proyek yang sedang diukur SROI-nya.

- d) *Drop-off*

Drop-off akan mengetahui bagaimana suatu dampak akan tetap dirasakan dalam jumlah yang sama atau lebih sedikit setelah tahun ke-2 program atau proyek yang sedang dievaluasi berjalan. Persentasi *drop-off* menunjukkan besarnya persentase penurunan nilai dampak setiap tahun.

- 5) Menghitung (*Calculate*) rasio SROI

Beberapa tahapan perhitungan nilai rasio SROI dapat dilakukan sebagai berikut.

- a) Menghitung total nilai *input* suatu fasilitas di suatu lokasi.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- b) Menghitung *adjusted value*, yaitu nilai setiap manfaat setelah dikurangi *filter* untuk setiap dampak.
- c) Setelah itu, hitung total *value* setiap *outcome* dengan menggunakan persentase *drop-off* selama jangka waktu tertentu.
- d) Dengan menggunakan data total *value* setiap tahun maka kini dapat dihitung *net present value*. Kemudian angka tersebut dapat dihitung menggunakan rumus rasio SROI sebagai berikut.

$$SROI = \frac{\text{Present Value of Impact}}{\text{Present Value of Investment}}$$

Sebagai contoh, jika rasio SROI yang dihasilkan sebesar 2,43 artinya, setiap Rp. 1 yang diinvestasikan untuk fasilitas atau program yang dilakukan dapat menghasilkan manfaat (*benefit*) sebesar Rp. 2,43 atau lebih besar Rp. 1,43 dibandingkan nilai investasinya.

6) Pelaporan , penggunaan, dan penetapan (*Reporting, using, & embedding*)

Analisis SROI harus dapat memastikan bahwa semua tahapan yang telah dilakukan sudah dikomunikasikan dengan baik dengan *stakeholders* yang terkait. Sebagai contoh, apabila rasio ini digunakan oleh pemerintah daerah maka rasio SROI ini harus dapat mengubah pandangan, cara kerja, sistem pengawasan, perubahan organisasi dari pemerintah daerah tersebut maupun pemangku kepentingan secara keseluruhan. Jika rasio SROI yang dihasilkan sangat rendah maka ada proses perbaikan yang dilakukan. Perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*) inilah yang akan menjadikan manfaat dari sebuah fasilitas/program dapat benar-benar dirasakan bagi masyarakat secara berkesinambungan (*sustainable development*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Parikesit et al. (2023) dengan judul “Analisis Dampak Investasi Sosial PT Perusahaan Gas Negara Tbk Diukur menggunakan *Social Return On Investment* (Studi Kasus Program Bank Sampah)” menjadi referensi penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur dampak dari investasi sosial yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Proses pengukuran dilakukan menggunakan *Social Return On Investment* (SROI) melalui program Bank Sampah). Penggunaan SROI dilakukan karena alat ini menawarkan kerangka partisipatif untuk mengukur dampak sosial bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan relevan lainnya. Berdasar hasil proses pertama adapun para pihak yang terlibat terdiri dari: (1) perwakilan Pengurus Bank Sampah sebanyak dua belas orang; (2) nasabah Bank Sampah sebanyak tiga belas orang; (3) perwakilan pemerintah, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun dinas sebanyak delapan orang; (4) perwakilan masyarakat sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil penghitungan dampak sosial menggunakan SROI diketahui rasio atasnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, capaian rasio SROI sebesar 1 : 4,09 sebelum kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dengan besaran 1 : 4,76. Nilai SROI Ratio merepresentasi setiap 1 Rupiah yang diinvestasikan PGN memberikan social value sebesar: (1) pada tahun 2020 sebesar Rp 4,09 dan (2) pada tahun 2021 sebesar Rp 4,76. Tren peningkatan atas pelaksanaan program terjadi karena kelompok yang terus melakukan inovasi pelaksanaan program Bank Sampah. Proses ini juga menjadi wujud nyata kontribusi pembangunan berkelanjutan, khususnya pada tujuan nomor 1 tanpa kemiskinan, nomor 3 hidup sehat, nomor 5 kesetaraan gender, nomor 6 air bersih dan sanitasi yang layak, dan nomor 17 kemitraan untuk mencapai tujuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ningsih dan Meiden (2022), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penilaian Materialitas pada Laporan Keberlanjutan Industri Dasar dan Kimia Tahun 2020” meneliti pengungkapan informasi yang materialitas yang bertujuan untuk membantu pemangku kepentingan pada proses pengambilan keputusan. Peneliti ini melibatkan 14 perusahaan industri dasar dan kimia dan wawancara dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan, sebanyak 3 perusahaan tidak menyajikan definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan mereka. Proses penilaian materialitas melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda, dan tidak semua perusahaan mengindikasikan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam seluruh tahap proses penilaian materialitas. Perusahaan-perusahaan tersebut mengidentifikasi berbagai masalah sebagai topik material dan analisis materialitas, dengan sebagian besar mengelompokkan isu-isu tersebut di bawah tema sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dalam 6 dari 14 perusahaan, isu-isu material utama disajikan dengan pembagian tingkat materialitas, yaitu “Tinggi”, “Sedang”, dan “Rendah”.

Melinda dan Makarnayawati (2020), dalam penelitian yang berjudul “The Effect of Environmental, Sosial, Governance, and Controversies on Firms Value: Evidence from Asia” meneliti hubungan antara indeks Environmental, Social and Governance (ESG) dan nilai perusahaan serta mengkaji bagaimana skor kontroversi mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Environmental, Social, dan Governance secara Individual mempengaruhi nilai perusahaan, pengungkapan aspek ESG sangat penting tidak hanya untuk meningkatkan nilai perusahaan tetapi juga untuk menunjukkan ketahanan dan keberlanjutan perusahaan. Selain itu, skor kontroversi ESG secara mengejutkan menunjukkan hubungan positif dengan nilai perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa kontroversi memberikan sinyal positif pada investor, karena kontroversi dapat memberikan sinyal kepada publik tentang transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

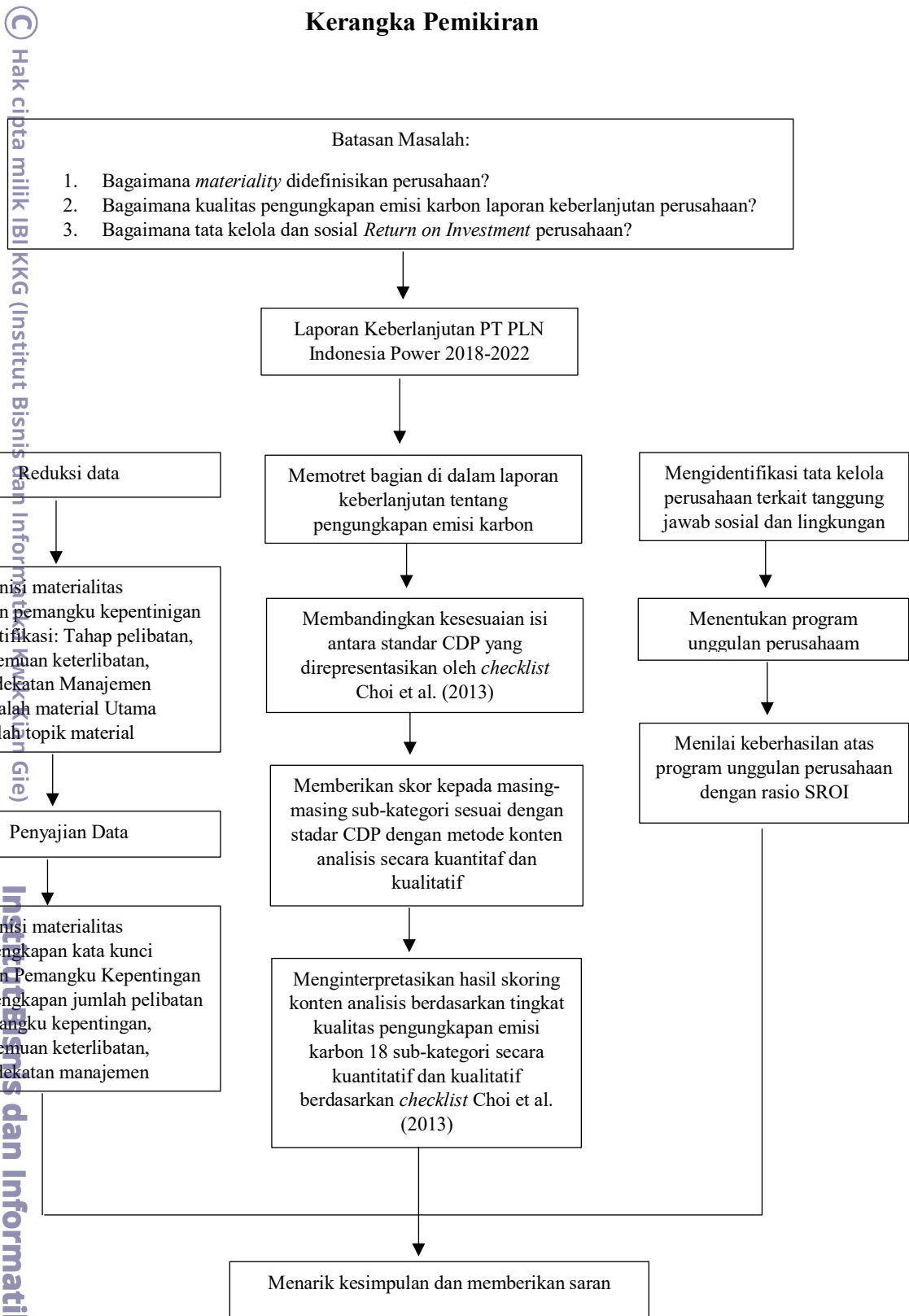
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah peneliti

1. Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.